

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan dan analisa yang penulis ungkapkan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan termasuk militer, dan itu telah di atur di dalam berbagai Perundang-undangan baik dari UUNRI, UU HAM bahkan sampai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Namun di dalam implementasi nya terutama di era Orba justru lebih banyak ekse negatif nya, yang menjadi faktor utama hilangnya hak politik TNI, Meskipun ada faktor pendukung yang lainnya seperti tuntutan profesionalitas militer di era modern dimana militer hanya memiliki satu fungsi yakni hankam. Sejalan dengan globalisasi maka Hak Asasi Manusia akan terwujud kan jika ada pembatasan penggunaan kewenangan aparat represif negara. Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi atau terlihat minus.
2. Militer di sebut profesional adalah militer yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis hal itu di atur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 sebagai salah satu jati diri. TNI mempersyaratkan TNI harus terlatih, terdidik, di perlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan

di jamin kesejahteraan nya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Munculnya fenomena militer dalam keterlibatan politik yang terdahulu dapat di jadikan cerminan atau pengalaman supaya di akan datang militer fokus dengan peran Hankam.
2. Penghapusan Hak Politik TNI yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 di harapkan bisa menjadi acuan TNI untuk terus bersikap profesional baik sekarang maupun di masa akan datang.
3. Untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional tidak hanya di lakukan oleh kalangan intern TNI saja, namun harus ada dukungan atau partisipasi aktif dari seluruh komponen Bangsa termasuk rakyat.